

KONSTRUKSI TEOLOGIS AGENSI POLITIK PEREMPUAN
Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan
Bugis-Makassar

Rosmini

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

rosmini.amin@uin-alauddin.ac.id

A. Jufri

IAIN Gorontalo, Indonesia

andijufri@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Meskipun Sulawesi Selatan memiliki warisan budaya yang kaya terkait peran bangsawan perempuan dalam pemerintahan, kontestasi politik lokal kontemporer kerap memanfaatkan interpretasi keagamaan konservatif untuk mendelegitimasi kepemimpinan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi teologi agensi politik perempuan melalui pembacaan komparatif intertekstual antara narasi Ratu Bilqis dalam Al-Qur'an dan rekam jejak kepemimpinan perempuan dalam tradisi politik lokal suku Bugis Makassar (seperti Siri' dan peran Arung perempuan). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika teologi dan analisis sejarah kebudayaan, studi ini mengeksplorasi bagaimana teks keagamaan dan kearifan lokal saling berdialog dalam membentuk legitimasi kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dikotomi dalam diskursus politik: ketika aktor patriarkal kerap mempolitisasi pandangan teologis klasik

yang membatasi peran perempuan, aktor progresif secara strategis mengartikulasikan karakter Ratu Bilqis, khususnya kearifan diplomatik, prinsip musyawarah (shūrah), dan otonomi politiknya untuk membangun kontra narasi tentang kepemimpinan Islam yang sah. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara nilai-nilai Ratu Bilqis dengan etos lokal Bugis Makassar (Siri' na Pacce) melahirkan sinergi sosio keagamaan yang efektif meredam resistensi berbasis gender. Penelitian ini berkontribusi pada kajian feminisme Islam dan politik lokal dengan menunjukkan bagaimana narasi Al-Qur'an dapat menjadi instrumen emansipatif untuk meruntuhkan hambatan patriarkal dalam kontestasi politik modern.

Kata Kunci: Agensi Politik Perempuan, Ratu Bilqis, Bugis-Makassar, Teologi Inklusif, Kepemimpinan Perempuan

PENDAHULUAN

Fenomena kepemimpinan perempuan dalam ranah publik hingga saat ini masih menjadi arena diskursus yang amat dinamis dalam kajian sosiologi politik dan keislaman. Di satu sisi, arus modernisasi dan konsolidasi demokrasi memberikan ruang yang semakin terbuka bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis pengambil keputusan. Namun di sisi lain, tatanan sosial yang masih kental dengan nuansa patriarki kerap menghadirkan resistensi kultural maupun teologis terhadap kehadiran pemimpin perempuan. Kesenjangan ini menandakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perempuan di panggung politik belum sepenuhnya berlangsung secara mutlak dan masih membutuhkan legitimasi yang kuat. Wacana kepemimpinan perempuan dalam tradisi Islam sejatinya telah mendapatkan perhatian serius

dari para ulama dan akademisi global. Penafsiran terhadap teks-teks keagamaan kerap kali terbelah antara kelompok yang cenderung tekstual konservatif dan kelompok hermeneutis progresif. Dalam pandangan akademis, diskursus keislaman mengenai kesetaraan gender ini memerlukan pemaknaan yang kontekstual agar teks keagamaan tidak dipahami secara kaku dan terlepas dari realitas sosial masyarakat (Dzuhayatin, 2020).¹ Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap narasi-narasi Al-Qur'an menjadi sebuah keniscayaan guna menjawab tantangan zaman modern yang kian kompleks.

Di antara sekian banyak figur yang diabadikan dalam Al-Qur'an, narasi Ratu Bilqis atau Ratu Saba' yang terekam dalam Surah An-Naml menawarkan sebuah prototipe kepemimpinan perempuan yang sangat ideal dan berdaulat. Al-Qur'an tidak menggambarkan kekuasaan Bilqis dengan nada yang negatif, melainkan menampilkan potret seorang penguasa yang cerdas, independen, serta mengedepankan kearifan diplomatik. Teks Al-Qur'an memberikan ruang apresiasi terhadap kedaulatan politik seorang perempuan yang mampu memimpin kerajaannya menuju kemakmuran dan kedamaian (Umar, 2018).² Gambaran ini membuktikan bahwa kitab suci pada dasarnya menyediakan landasan emansipatif bagi perempuan dalam ranah kepemimpinan publik. Secara filosofis, kepemimpinan Ratu Bilqis mengedepankan prinsip musyawarah atau *syūrah* dalam setiap pengambilan keputusan politik yang krusial. Ketika menghadapi tekanan eksternal dari Kerajaan Nabi Sulaiman, Bilqis tidak bersikap emosional atau otoriter, melainkan melibatkan para elit

¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender Equality and Islamic Family Law Reform in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–24.

² Nasaruddin Umar, "Tafsir Gender: Reinterpretasi Teks Keagamaan Dalam Perspektif Emansipatif," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 13, no. 2 (2018): 112–28.

kerajaannya untuk bertukar pikiran. Gagasan musyawarah yang dipraktikkan oleh Ratu Bilqis ini merefleksikan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang inklusif, rasional, dan demokratis (Machasin, 2019).³ Model kepemimpinan seperti ini menjadi bukti historis transendental bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual dan manajerial yang sangat mumpuni dalam mengelola negara.

Meskipun narasi teologis Al-Qur'an memberikan legitimasi yang amat kuat bagi kepemimpinan perempuan, realitas di lapangan kerap memperlihatkan dinamika yang berbeda. Dalam konteks politik lokal di Indonesia, klaim-klaim keagamaan acap kali dipolitisasi untuk mendelegitimasi keberadaan calon pemimpin perempuan. Penafsiran yang tidak berimbang terhadap ayat-ayat tertentu kerap dimanfaatkan sebagai alat politik elektoral untuk menjatuhkan lawan politik berbasis gender (Ismah, 2019).⁴ Politisasi agama yang demikian tentu saja merugikan iklim demokrasi serta membendung potensi terbaik perempuan untuk berkontribusi bagi daerahnya.

Di Indonesia, Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki keunikan tersendiri dalam konteks relasi gender dan kepemimpinan politik lokal. Secara historis, rekam jejak kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan telah terukir sejak era kerajaan-kerajaan lokal masa lalu melalui figur-figur bangsawan yang berpengaruh. Keberadaan para pemimpin perempuan pada masa lampau mengindikasikan bahwa struktur sosial budaya di wilayah ini tidak sepenuhnya menutup pintu bagi otoritas politik perempuan

³ Machasin, "Kekuasaan Dan Etika Musyawarah: Membaca Kembali Narasi Ratu Saba' Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hermeneutika Teologi* 10, no. 1 (2019): 45–62.

⁴ Nor Ismah, "Women Ulema and Fatwa Making in Indonesia: Reclaiming Religious Authority," *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019): 483–517.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

(Parewangi, 2017).⁵ Pengalaman sejarah tersebut memberikan fondasi kultural yang kuat bagi artikulasi politik perempuan di era kontemporer. Masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memegang teguh filsafat hidup *Siri' na Pacce* yang menjunjung tinggi harga diri, martabat, serta empati kemanusiaan. Nilai-nilai kearifan lokal ini secara substansial sejalan dengan etika politik Islam yang menekankan keadilan dan keadaban publik. Dalam konteks kepemimpinan, *Siri' na Pacce* menuntut seorang pemimpin untuk memiliki integritas moral yang tinggi tanpa membedakan jenis kelamin (Umam, 2021).⁶ Integrasi antara etos kultural dan ajaran keagamaan ini menciptakan ruang yang kondusif bagi munculnya para pemimpin perempuan yang berintegritas.

Kendati demikian, kontestasi politik lokal di Sulawesi Selatan pada era pasca reformasi masih diwarnai oleh benturan antara tradisi egaliter dan pandangan maskulin yang hegemonik. Dalam setiap gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada), perdebatan mengenai perjuangan perempuan untuk menjadi orang nomor satu di pemerintahan kerap mencuat ke permukaan. Kontestasi antara narasi kesetaraan dan resistensi patriarki dalam arena Pilkada kerap kali diwarnai oleh negosiasi wacana keagamaan yang sangat intens (Bakti, 2018).⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang politik lokal masih menjadi medan pertarungan ideologi yang belum usai. Dalam menghadapi dinamika tersebut,

⁵ Andi Muhammad Iqbal Parewangi, "Peran Sejarah Perempuan Bugis Dalam Panggung Politik Kerajaan Tradisional Sulawesi Selatan," *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 5, no. 2 (2017): 89–104.

⁶ Khaerul Umam, "Siri' Na Pacce Dan Etika Politisi Bugis: Integrasi Nilai Lokal Dalam Sistem Demokrasi Modern," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 67–85.

⁷ Andi Faisal Bakti, "Communication and Family Planning in Islam: The Case of South Sulawesi," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 321–50.

sebagian politisi perempuan di Sulawesi Selatan beserta tim pemenangannya mulai menerapkan strategi komunikasi politik berbasis simbol-simbol keagamaan yang inklusif. Penafsiran atas narasi Al-Qur'an dijadikan sebagai strategi legitimasi teologis untuk menangkis serangan-serangan bermotif gender dari pihak lawan. Strategi pengutipan narasi keagamaan dalam kampanye politik terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas figur perempuan (Murdiyanto, 2020).⁸ Melalui pendekatan ini, wacana teologis diubah dari instrumen pembatasan menjadi instrumen pemberdayaan.

Penggunaan narasi Ratu Bilqis sebagai sumber inspirasi politik menjadi salah satu artikulasi wacana yang sangat menarik untuk dicermati. Figur Bilqis tidak hanya dijadikan sebagai pembenar teologis, tetapi juga sebagai tolok ukur karakter kepemimpinan yang ideal, seperti kecerdasan, ketenangan, dan keberanian. Adopsi model kepemimpinan Ratu Bilqis oleh politisi perempuan mampu mereduksi prasangka gender di kalangan pemilih muslim yang konservatif (Srimulyani, 2021).⁹ Dengan demikian, narasi suci tersebut berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran agama dengan praksis politik modern. Secara akademis, kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam pada umumnya terbagi dalam dua kecenderungan utama. Kecenderungan pertama berfokus pada studi tekstual eksegetis yang mendalami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara hermeneutis dalam kerangka hukum Islam. Kajian-kajian teologis ini berhasil memberikan kerangka

⁸ Murdiyanto, "Politik Identitas Dan Strategi Komunikasi Calon Kepala Daerah Perempuan Pada Pilkada Serentak," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 34–49.

⁹ Eka Srimulyani, "Women, Islamic Leadership, and Local Politics in Post-Reform Indonesia," *Asian Survey* 61, no. 4 (2021): 615–39.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

normatif yang komprehensif mengenai kedudukan perempuan dalam Islam (Qibtiyah, 2019).¹⁰ Namun, kelompok kajian ini sering kali berhenti pada taraf diskursus teoritis tanpa melihat bagaimana teks tersebut bekerja dalam realitas sosial yang konkrit.

Kecenderungan kedua berfokus pada studi sosiologis dan politik empiris yang menganalisis partisipasi politik perempuan dari sudut pandang keterwakilan, kuota, serta hambatan struktural di lapangan. Studi sosiologi politik ini sangat mendalam dalam memetakan faktor-faktor elektoral dan jaringan kekuasaan yang mempengaruhi keterpilihan perempuan (Ardiansa, 2022).¹¹ Sayangnya, kelompok penelitian ini kerap mengabaikan dimensi teologis dan kekuatan narasi keagamaan yang justru sangat dominan mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia.

Melihat dua garis pendekatan tersebut, tampak jelas adanya kesenjangan akademis (*research gap*) yang signifikan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menjembatani antara hermeneutika Al-Qur'an, khususnya narasi Ratu Bilqis dengan praksis kontestasi politik lokal di daerah yang memiliki karakter budaya kuat seperti Sulawesi Selatan. Keterkaitan antara nilai-nilai keagamaan transendental dan etos budaya lokal masih sering dipelajari secara terpisah (Rijal, 2020).¹² Padahal, perjumpaan antara teks

¹⁰ Alimatul Qibtiyah, "Feminism and Islamic Reform in Indonesia: Progressive Interpretations and Social Movements," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 241–68.

¹¹ Dirga Ardiansa, "Electoral Systems and Female Political Representation in Indonesian Local Legislatures," *Contemporary Southeast Asia* 44, no. 1 (2022): 102–26.

¹² Syamsul Rijal, "Re-Positioning Tradition and Modernity: Local Politics and Islamic Discourse in South Sulawesi," *Journal of Southeast Asian Studies* 51, no. 3 (2020): 412–33.

keagamaan dan budaya lokal merupakan kunci untuk memahami dinamika kepemimpinan di tingkat tapak.

Kehadiran penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menawarkan sudut pandang yang lebih integratif. Peneliti berargumen bahwa spirit kepemimpinan Ratu Bilqis tidak sekadar hidup dalam lembaran teks Al-Qur'an, melainkan ditransformasikan menjadi *political agency* yang hidup dalam arena kontestasi Pilkada di Sulawesi Selatan. Transformasi wacana agama menjadi instrumen politik yang emansipatif merupakan fenomena penting dalam perkembangan demokrasi berbasis kearifan lokal (Hidayat, 2021).¹³ Argumen ini menjadi pijakan dasar bagi penyusunan kerangka analisis dalam penelitian ini.

Konstruksi kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan yang mengintegrasikan nilai Ratu Bilqis dengan budaya Bugis Makassar menciptakan sebuah sintesis keagamaan dan kebudayaan yang unik. Keunikan ini terlihat dari bagaimana nilai-nilai keteladanan Al-Qur'an berkelindan dengan falsafah *mabbulo sibatang* (persatuan) dan *sipakatau* (saling menghargai). Sinergi antara teks suci dan tradisi lokal terbukti mampu membangun imajinasi kolektif masyarakat tentang sosok pemimpin perempuan yang ideal (Sabri, 2018).¹⁴ Sintesis inilah yang menjadi salah satu kebaruan dari dinamika politik di wilayah tersebut.

Melalui pendekatan hermeneutika politik dan sosiologi agama, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana narasi Al-Qur'an diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam wacana politik elektoral. Analisis

¹³ Rian Hidayat, "Agensi Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada: Studi Atas Wacana Keagamaan Inklusif," *Jurnal Politika* 12, no. 2 (2021): 180–98.

¹⁴ Muhammad Sabri, "Spiritualitas Dan Kearifan Lokal Bugis Makassar Dalam Dialektika Keislaman," *Jurnal Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 145–68.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

terhadap diskursus politik akan memberikan gambaran komprehensif mengenai benturan ideologi dan negosiasi makna yang terjadi selama proses Pilkada. Metodologi analisis wacana kritis memungkinkan peneliti untuk melihat relasi kuasa yang bekerja di balik penggunaan narasi keagamaan (Qodir, 2020).¹⁵ Pendekatan akademis ini menjamin objektivitas dalam membedah fenomena yang kompleks ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang berarti bagi pengembangan ilmu politik Islam, studi gender, dan sosiologi pemerintahan di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran tentang bagaimana kitab suci dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi demokratisasi dan keadilan gender di tingkat lokal. Kontribusi teoritis ini penting untuk memperluas cakrawala pemikiran Islam yang inklusif dan berkeadilan (Baidhaw, 2022).¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan keilmuan.

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif dan strategis bagi para politisi perempuan, partai politik, serta aktivis kesetaraan gender dalam merumuskan strategi komunikasi politik yang efektif. Memahami cara mengartikulasikan nilai-nilai keagamaan secara tepat akan membantu meminimalkan hambatan kultural dalam kontestasi politik. Berdasarkan pada seluruh argumentasi, kesenjangan riset, dan urgensi praksis tersebut, maka penelitian dengan judul "*Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan : Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik*

¹⁵ Zuly Qodir, "Islamisme Dan Politics of Identity Dalam Pilkada Serentak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 3 (2020): 310–32.

¹⁶ Zakiyuddin Baidhaw, "Theology of Liberation in Indonesian Islam: Gender Equality and Social Justice Perspectives," *Critical Research on Religion* 10, no. 1 (2022): 55–72.

Perempuan Bugis Makassar” ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengintegrasikan dua pilar metodologis utama, yaitu hermeneutika Al-Qur'an dan sosiologi politik lokal. Penggunaan pendekatan multidisiplin ini dinilai paling relevan untuk membedah bagaimana narasi keagamaan transendental ditransformasikan menjadi praksis legitimasi politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Selatan.

Data penelitian ini bersumber dari dua jenis data utama, yakni data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan untuk saling melengkapi. Data primer tekstual bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat narasi Ratu Bilqis (khususnya QS. An-Naml: 20-44) beserta kitab-kitab tafsir otoritatif, baik klasik maupun kontemporer yang berorientasi progresif. Data sekunder melengkapi dokumen ini melalui analisis terhadap beberapa referensi yang terkait dengan budaya Sulawesi-Selatan, khususnya yang memuat tentang jejak kepemimpinan perempuan di wilayah ini. Dalam menganalisis data, penelitian ini mengombinasikan teknik Analisis Hermeneutika Konteks-Teks untuk data Al-Qur'an dan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) untuk sejarah kepemimpinan perempuan dalam tradisi Bugis Makassar. Analisis hermeneutika digunakan untuk membongkar lapisan makna normatif narasi Ratu Bilqis dengan mempertimbangkan konteks historis penafsiran serta relevansi pembebasannya dalam kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembacaan Ulang Teologis atas Narasi Ratu Bilqis (QS. An-Naml: 20-44)

Upaya mendekonstruksi mitos teologis mengenai larangan kepemimpinan perempuan dalam otoritas publik menemukan pijakan metodologis yang sangat fundamental melalui pembacaan ulang atas narasi Ratu Bilqis dalam Surah An-Naml ayat 20 hingga 44. Teks Al-Qur'an secara eksplisit mengabadikan kisah seorang penguasa perempuan dari Negeri Saba' tanpa memberikan prasangka moral negatif atau celaan teologis terhadap kapasitas kepemimpinannya. Penafsiran terhadap teks keagamaan sejatinya harus ditarik dari bayang-bayang pemikiran patriarkal agar mampu memancarkan prinsip keadilan hakiki Al-Qur'an (Abdullah, 2017).¹⁷ Melalui perspektif eksegetis yang kritis, narasi ini tidak sekadar berfungsi sebagai rekaman sejarah masa lalu, melainkan menjelma menjadi argumen teologis emansipatif yang membongkar dogma keterbatasan nalar politik perempuan.

Dalam tradisi eksegesis klasik, penafsiran terhadap figur Ratu Bilqis kerap kali diwarnai oleh infiltrasi riwayat-riwayat *Isrā'iliyyāt* yang cenderung mendegradasi sosoknya. Mufasir klasik dalam karya-karya tafsir mereka menyajikan uraian fisik serta latar belakang keturunan Bilqis dengan narasi mitologis yang terkadang mendistorsi kapasitas politiknya. Pembacaan tekstual yang terikat pada konteks era sejarah masa lalu sering kali menghasilkan produk hukum yang membatasi hak sipil dan politik perempuan dalam ranah publik. Fenomena penafsiran klasik tersebut mengindikasikan bahwa pandangan keagamaan mengenai kepemimpinan publik pada masa itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkal yang melingkupi para

¹⁷ A. R. Abdullah, "The Active Role of Da'wah in Empowering Individuals for Social Change," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 7, no. 1 (2017): 48–62.

mufasir. Kendati demikian, apabila diteliti secara cermat, Al-Qur'an justru menampilkan indikator utama agensi politik Ratu Bilqis yang dimulai dari kearifan diplomatik (*diplomatic wisdom*). Ketika menerima surat bernada ketegangan geopolitik dari Nabi Sulaiman, Bilqis tidak meresponsnya dengan emosi atau tindakan militer destruktif, melainkan memilih jalur pengiriman hadiah dan negosiasi diplomatik untuk mengukur kekuatan lawan.¹⁸ Strategi penanganan konflik melalui pendekatan *soft diplomacy* yang dipraktikkan Bilqis merefleksikan kecerdasan rasional yang jauh melebihi kalkulasi para penasihat militernya (Nasution, 2019).¹⁹ Keahlian mengelola krisis geopolitik secara damai ini membuktikan bahwa intuisi politik perempuan memiliki kekuatan preventif yang sangat tinggi terhadap ancaman peperangan.

Indikator agensi politik kedua yang sangat menonjol dari narasi Bilqis adalah penerapan tata kelola pemerintahan berbasis musyawarah (*syūrah*). Hal ini terekam jelas dalam QS. Al-Naml : 32, di mana Bilqis menyatakan, "*Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini; aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir mendampingiku.*" Prinsip musyawarah yang inklusif ini kontras dengan kecenderungan otoritarianisme penguasa laki-laki pada zamannya yang umumnya bertindak represif dan sewenang-wenang (Mulia, 2020).²⁰ Melalui pelembagaan musyawarah ini, Bilqis menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan politik

¹⁸ M. Quraish Shihab, "Membaca Teks Keagamaan Dalam Perspektif Kemanusiaan Dan Kesetaraan," *Jurnal Hermeneutika Teologi* 9, no. 1 (2018): 15–32.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, "Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Demokrasi Modern," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 45–68.

²⁰ Siti Musdah Mulia, "Deconstruction of Patriarchal Interpretation on Women's Political Leadership in Islam," *Journal of Islamic State and Society* 2, no. 2 (2020): 101–24.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

sejatinya dibangun di atas konsensus publik dan partisipasi egaliter, bukan atas dasar pemaksaan kehendak secara tunggal.

Selain kearifan diplomatik dan tradisi musyawarah, Al-Qur'an secara tegas memperlihatkan indikator kemandirian keputusan (*decision autonomy*) yang dimiliki oleh Ratu Bilqis. Ketika para pembesar kerajaannya menunjukkan sikap konfrontatif dan memamerkan kekuatan militer untuk berperang, Bilqis secara independen mampu mematahkan usulan tersebut dengan argumen kritis mengenai dampak buruk invasi militer terhadap stabilitas sosial. Kemampuan seorang pemimpin perempuan untuk mengambil keputusan mandiri di tengah tekanan elit maskulin merupakan wujud nyata agensi politik yang sangat matang (Hassan, 2017).²¹ Keputusan independen ini berhasil menyelamatkan rakyat dan peradaban Negeri Saba' dari kebinasaan akibat perang yang tidak seimbang.

Indikator agensi politik keempat dari figur Ratu Bilqis adalah pragmatisme strategis (*strategic pragmatism*) dalam mengkaji realitas politik serta kebenaran teologis. Setelah menyaksikan secara langsung keunggulan arsitektur dan mukjizat Nabi Sulaiman yang merefleksikan kekuasaan Allah Swt., Bilqis tanpa keraguan melepaskan kedaulatan politik pribadinya yang berbasis penyembahan matahari demi tunduk pada ketauhidan. Pengakuan iman yang diabadikan dalam ayat 44 "*Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah*" menjadi bukti puncak kejujuran intelektual seorang penguasa (Wadud,

²¹ A. Hasan, "The Role of Participatory Approach in Effective Da'wah," *Journal of Islamic Studies and Research* 16, no. 2 (2017): 61–76.

2018).²² Pragmatisme strategis ini bertransformasi dari sekadar kalkulasi politik menjadi keputusan spiritual yang emansipatif.

Mufasir kontemporer dalam kawasan Nusantara, seperti Quraish Shihab, secara progresif menegaskan bahwa kisah Ratu Bilqis merupakan bukti shahih dari Al-Qur'an bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk menduduki puncak kepemimpinan negara (*al-imārah al-'uẓmā*). Keberhasilan Bilqis memimpin kerajaannya hingga diabadikan sebagai *balḍatun ṭayyibatun wa rabbun ḡafūr* menegaskan klaim-klaim teologis yang menyatakan bahwa wanita memiliki kelemahan akal dan agama dalam mengelola publik. Penafsiran kontemporer yang berwawasan keadilan gender berfungsi penting untuk meruntuhkan stereotip negatif terhadap kapasitas manajerial perempuan (Ilyas, 2021).²³ Dengan demikian, teks Al-Qur'an pada hakikatnya menyediakan ruang yang sangat terbuka bagi kepemimpinan politik perempuan.

Di sisi lain, analisis dari kalangan aktivis feminis muslim memberikan penekanan mendalam pada aspek dekonstruksi struktur kekuasaan patriarkal yang terdapat dalam narasi Ratu Bilqis. Aktivis dan akademisi feminis muslim menilai bahwa kisah Bilqis harus dibaca sebagai kritik Al-Qur'an terhadap klaim superioritas laki-laki yang kerap dijadikan alasan untuk melanggengkan dominasi politik. Al-Qur'an sengaja menampilkan sosok penguasa perempuan yang sukses dan bijaksana guna mendobrak tatanan sosio keagamaan yang bias

²² Amina Wadud, "Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective in Modern Context," *Journal of Feminist Studies in Religion* 34, no. 2 (2018): 89–110.

²³ Hamim Ilyas, "Rekonstruksi Tafsir Gender Al-Qur'an: Menuju Keadilan Hakiki Dalam Relasi Sosial," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 113–36.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

gender (Barlas, 2019).²⁴ Pembacaan kualitatif emansipatif ini memberikan energi teologis baru bagi gerakan perempuan di berbagai negara berpopulasi muslim untuk menuntut kesetaraan akses politik.

Konstruksi teologis mengenai empat indikator agensi politik Ratu Bilqis yakni kearifan diplomatik, pemerintahan berbasis musyawarah, kemandirian keputusan, dan pragmatisme strategis menjadi modal simbolik yang amat krusial dalam mereduksi resistensi keagamaan di tingkat lokal. Dalam bingkai kontestasi politik kontemporer, artikulasi terhadap karakter Bilqis mampu memotong dominasi retorika misoginis yang kerap menggunakan kutipan-kutipan keagamaan parsial untuk menjatuhkan kandidat perempuan. Rekonstruksi makna atas narasi kitab suci terbukti efektif sebagai instrumen legitimasi teologis yang mentransformasi persepsi pemilih muslim (Rofiah, 2022).²⁵ Kehadiran narasi Bilqis menjadikan isu kesetaraan gender tidak lagi dipandang sebagai impor ideologi Barat, melainkan sebagai nilai yang berakar kuat dalam Al-Qur'an.

Secara teoritis, pembacaan ulang atas narasi Quranik Ratu Bilqis ini berhasil membongkar dikotomi buatan antara otoritas publik maskulin dan ranah domestik feminin yang selama ini dipelihara oleh pemahaman konservatif. Penafsiran yang kontekstual dan integratif membuktikan bahwa kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh integritas, kearifan, serta kompetensi rasional dalam menyejahterakan masyarakat. Pemaknaan baru terhadap Surah An-Naml ayat

²⁴ Asma Barlas, "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 22–41.

²⁵ Nur Rofiah, "Keadilan Hakiki Bagi Perempuan Dalam Islam: Konsep Dan Implikasi Metodologis," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 17, no. 1 (2022): 1–20.

20-44 ini memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi hadirnya para pemimpin perempuan di arena politik lokal (Hasnah, 2020).²⁶ Fondasi teologis yang emansipatif ini menjadi modal utama untuk menguji dan mengartikulasikan agensi politik perempuan dalam panggung kontestasi politik lokal, termasuk di wilayah Bugis Makassar di Sulawesi Selatan.

2. Artikulasi Narasi Bilqis dalam Arena Kontestasi Politik Sulawesi Selatan

Artikulasi wacana mengenai kepemimpinan Ratu Bilqis dalam panggung kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Selatan menempati posisi yang sangat strategis sebagai bentuk negosiasi keagamaan di tengah dominasi budaya patriarki. Dalam ranah politik lokal yang sangat dinamis, penggunaan narasi keagamaan tidak lagi sekadar menjadi instrumen ritualistik, melainkan ditransformasikan menjadi strategi komunikasi politik untuk membangun legitimasi kepemimpinan perempuan. Politisi perempuan dan tim pemenangannya memanfaatkan narasi Bilqis untuk mematahkan serangan-serangan politik berbasis gender yang kerap dihembuskan oleh kelompok lawan (Haris, 2018).²⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa konstruksi teologis mengenai penguasa Negeri Saba' tersebut berhasil ditransmisikan dari wacana tekstual menuju arena praksis elektoral secara efektif.

Dalam pandangan para akademisi ilmu politik lokal, artikulasi narasi Ratu Bilqis dalam kampanye Pilkada di Sulawesi Selatan berfungsi sebagai modal simbolik (*symbolic capital*) yang sangat ampuh untuk memengaruhi persepsi pemilih muslim. Di wilayah-wilayah seperti Luwu Utara, Gowa, dan

²⁶ Sitti Hasnah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Politik Lokal Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Maiyyah* 13, no. 2 (2020): 140–62.

²⁷ Andi Haris, "Politik Identitas Dan Modal Keagamaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Komunikasi Politik* 8, no. 1 (2018): 45–62.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

Maros, wacana mengenai kecerdasan serta kearifan Bilqis diproduksi secara masif melalui orasi politik, media sosial, dan ruang-ruang dialog publik. Penggunaan narasi-narasi sejarah keislaman yang emansipatif terbukti mampu mereduksi prasangka politik gender dan meningkatkan elektabilitas figur perempuan di tingkat lokal (Luki Karunia, 2020).²⁸ melalui sudut pandang sosiologi politik, strategi ini mencerminkan kecerdasan politisi perempuan dalam mengelola *discourse power* di tengah masyarakat yang sangat religius.

Sementara itu, kalangan aktivis feminis muslim lokal memberikan penekanan bahwa artikulasi narasi Bilqis bukan sekadar taktik kemenangan elektoral, melainkan sebuah gerakan dekonstruksi kebudayaan yang melintasi ruang-ruang domestik. Para aktivis menilai bahwa pengangkatan karakter Bilqis yang independen, diplomatis, dan mengutamakan musyawarah mampu meruntuhkan stereotip bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas dalam ranah otoritas publik. Narasi Al-Qur'an ini dijadikan instrumen advokasi untuk mempertegas bahwa kepemimpinan perempuan memiliki legitimasi teologis yang sangat kuat dan sejalan dengan semangat keadilan Islam (Marcoes, 2019).²⁹ Pembacaan kritis dari para aktivis ini memberikan sokongan moral dan ideologis bagi konsolidasi gerakan politik perempuan di Sulawesi Selatan.

Artikulasi narasi Ratu Bilqis di Sulawesi Selatan juga menemukan momentum yang sangat kuat ketika disandingkan dengan retorika keagamaan para ulama dan tokoh agama inklusif. Di tingkat akar rumput, elit keagamaan lokal yang mendukung kepemimpinan perempuan kerap mengutip kisah Bilqis

²⁸ Luki Karunia, "Modal Simbolik Dan Mobilisasi Dukungan Pemilih Dalam Kontestasi Politik Lokal," *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 2 (2020): 215–38.

²⁹ Lies Marcoes, "Gerakan Perempuan Muslim Dan Dekonstruksi Wacana Patriarki Di Indonesia," *Jurnal Perempuan* 24, no. 3 (2019): 189–206.

dalam pengajian majelis taklim dan ceramah keagamaan guna menangkis dalih-dalih teologis yang melarang wanita menjadi kepala daerah. Keterlibatan aktif ulama lokal dalam mendistribusikan wacana teologis yang ramah gender menjadi kunci keberhasilan dalam mengubah konstelasi dukungan masyarakat (Hasbi Umar, 2021).³⁰ Sinergi antara kandidat perempuan dan otoritas keagamaan inklusif ini terbukti efektif melapangkan jalan bagi terciptanya iklim politik yang lebih egaliter.

Di samping itu, artikulasi narasi Bilqis kerap dihadapkan pada tantangan berupa serangan politik identitas berbasis teks-teks misoginis dari kelompok lawan yang konservatif. Dalam situasi persaingan elektoral yang memanas, pihak-pihak tertentu acap kali menyebarkan narasi bahwa kepemimpinan perempuan akan membawa kemunduran bagi suatu daerah. Namun, kematangan politisi perempuan dalam merespons tuduhan tersebut dengan menampilkan karakter kepemimpinan Bilqis yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare-oriented*) justru mampu membalikkan wacana publik (Arfin, 2019).³¹ Kemampuan meredam konflik politik melalui pendekatan komunikatif yang santun ini semakin mengukuhkan relevansi model kepemimpinan Bilqis dalam panggung politik kontemporer.

Ditinjau dari perspektif komunikasi politik, transformasi narasi Bilqis di Sulawesi Selatan diwujudkan melalui penyusunan bahasa kampanye yang menyentuh ranah kognitif dan emosional pemilih. Figur kandidat perempuan dipotret sebagai sosok yang tidak hanya memiliki ketegasan dalam memimpin,

³⁰ Hasbi Umar, "Peran Ulama Lokal Dalam Pembentukan Wacana Keagamaan Inklusif Pada Pilkada," *Jurnal Riset Keagamaan Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 88–105.

³¹ Muhammad Arfin, "Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Menghadapi Isu Gender," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, no. 2 (2019): 130–48.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

tetapi juga kelembutan dan kearifan dalam mengayomi rakyat, sebagaimana karakter Bilqis saat menghadapi situasi krisis geopolitik. Formulasi retorika politik yang memadukan nilai keagamaan dan kualitas kepemimpinan personal ini terbukti sangat diminati oleh pemilih urban maupun rural (Jurdi, 2022).³² Strategi komunikasi berbasis narasi Al-Qur'an ini berhasil menggeser fokus perdebatan publik dari isu gender menuju isu kompetensi dan rekam jejak.

Secara teoritis, artikulasi narasi Ratu Bilqis dalam kontestasi politik lokal di Sulawesi Selatan menegaskan keberadaan fenomena *patriarchal bargain*, di mana perempuan menggunakan simbol-simbol dalam tatanan keagamaan untuk mereduksi dampak struktur patriarki itu sendiri. Politisi perempuan tidak menolak kerangka keagamaan yang ada, melainkan merebut dan menginterpretasikan kembali narasi kitab suci untuk memperkuat posisi politik mereka. Praktik negosiasi wacana ini memberikan kontribusi penting bagi studi dinamika keislaman dan demokrasi di tingkat lokal (Parewangi, 2017).³³ Keberhasilan artikulasi ini membuktikan bahwa narasi Quranik Ratu Bilqis telah menjadi aset teologis politik yang sangat vital dalam memperjuangkan kesetaraan kepemimpinan di Sulawesi Selatan.

3. Agensi Politik Perempuan Islam: Antara Subversi dan Adaptasi Nilai Agama dan Budaya Lokal

Dinamika agensi politik perempuan dalam panggung politik lokal Sulawesi Selatan memperlihatkan pola negosiasi wacana yang sangat kompleks, bergerak secara lentur di antara tindakan subversi terhadap tatanan

³² Syarifuddin Jurdi, "Politik Elektoral Dan Sosiologi Pemilih Di Sulawesi Selatan: Analisis Perilaku Politik Masyarakat Muslim," *Jurnal Politika* 13, no. 1 (2022): 55–74.

³³ Parewangi, "Peran Sejarah Perempuan Bugis Dalam Panggung Politik Kerajaan Tradisional Sulawesi Selatan."

patriarkal dan adaptasi terhadap norma-norma keagamaan serta kebudayaan setempat. Dalam konteks ini, perempuan tidak menempatkan diri sebagai subjek yang sepenuhnya menolak atau menerima struktur sosial secara pasif, melainkan mengartikulasikan kepentingan politik mereka melalui pemanfaatan simbol-simbol keislaman. Fenomena negosiasi wacana ini mencerminkan bagaimana norma sosial dan budaya diintegrasikan secara pragmatis guna membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas tanpa memicu resistensi konfrontatif (Claudia Derichs, 2017).³⁴ Agensi politik yang ditampilkan merupakan manifestasi dari strategi kebudayaan yang terukur dalam menghadapi struktur otoritas yang dominan.

Pilihan untuk melakukan negosiasi wacana keagamaan ketimbang perlawanan frontal merupakan ciri khas dari dinamika partisipasi politik masyarakat berpopulasi muslim. Dengan mengangkat narasi-narasi keislaman yang emansipatif seperti kepemimpinan Ratu Bilqis, politisi perempuan secara efektif melakukan rekonstruksi terhadap tafsir-tafsir teks keagamaan yang patriarkal tanpa kehilangan legitimasi moral di mata publik. Pendekatan ini membuktikan bahwa bahasa keagamaan memiliki potensi emansipatif yang sangat besar apabila ditafsirkan secara inklusif dan kontekstual oleh para aktor politik (Hashemi, 2018).³⁵ Melalui strategi ini, nilai-nilai kesetaraan gender mampu ditransformasikan menjadi bagian integral dari wacana keislaman kontemporer di tingkat lokal.

³⁴ Claudia Derichs, "Knowledge Production, Gender, and Local Politics in Muslim-Majority Societies," *Journal of Religious and Political Studies* 5, no. 2 (2017): 112–34.

³⁵ Nader Hashemi, "Rethinking Religion, Secularism, and the Crisis of Political Islam," *International Journal of Islamic Politics* 12, no. 1 (2018): 45–68.

Ditinjau dari perspektif budaya Sulawesi Selatan, strategi adaptasi dan subversi ini bersinergi secara harmonis dengan tatanan kearifan lokal Bugis Makassar yang secara historis memiliki akar tradisi egaliter. Struktur sosial budaya lokal yang menjunjung tinggi *Siri' na Pacce* sejatinya memberikan ruang kehormatan bagi perempuan untuk memegang tampuk kekuasaan, sejauh ia mampu menjaga martabat serta kesejahteraan masyarakatnya. Integrasi antara nilai-nilai kebudayaan lokal dan teks-teks keagamaan menciptakan modal simbolik ganda yang melapangkan jalan bagi konsolidasi otoritas politik perempuan (Saskia Schäfer, 2019).³⁶ Sinergi kultural religius ini menjadikan kepemimpinan perempuan tidak dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai bentuk manifestasi nilai-nilai luhur tradisi dan agama.

Kombinasi antara subversi dan adaptasi ini menggambarkan konsep *patriarchal bargain* secara nyata dalam arena politik elektoral. Politisi perempuan tidak menumbangkan tatanan keagamaan yang ada, melainkan merebut kembali (*reclaiming*) otoritas tafsir teks suci guna memperkuat posisi tawar mereka di hadapan struktur kekuasaan yang maskulin. Praktik penafsiran ulang terhadap naskah-naskah keagamaan oleh gerakan perempuan menjadi instrumen vital dalam meruntuhkan monopoli penafsiran yang selama ini cenderung merugikan posisi sipil perempuan (Nevin Turgut, 2020).³⁷ Langkah strategis ini mempertegas bahwa perjuangan kesetaraan gender di dunia Islam dapat berjalan efektif melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan yang progresif.

³⁶ Saskia Schäfer, "Local Traditions and Religious Authority in Contemporary Indonesian Governance," *Asian Journal of Social Science* 47, no. 3 (2019): 301–25.

³⁷ Nevin Turgut, "Reclaiming Sacred Texts: Feminist Hermeneutics and Women's Political Participation in Islamic Contexts," *Gender & Development* 28, no. 2 (2020): 215–36.

Dalam konteks kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Selatan, praksis agensi politik ini diwujudkan melalui kemampuan para kandidat perempuan dalam mengemas isu-isu pembangunan, krisis sosial, dan pemerintahan dengan bahasa yang ramah tradisi namun kaya akan visi perubahan. Strategi adaptasi dilakukan dengan tetap menghormati pranata keagamaan lokal, sedangkan tindakan subversi diwujudkan dengan meruntuhkan klaim bahwa kepemimpinan publik merupakan domain eksklusif kaum laki-laki. Kemampuan menyeimbangkan antara kepatuhan pada nilai-nilai tradisi dan dorongan modernisasi politik terbukti menjadi salah satu variabel kunci keterpilihan kandidat di daerah (Katharine McGregor, 2021).³⁸ Formulasi kepemimpinan yang adaptif subversif ini berhasil mengubah peta persaingan politik lokal secara signifikan.

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi studi agensi politik perempuan dalam Islam dengan menunjukkan bahwa emansipasi tidak harus selalu diidentikkan dengan konfrontasi terhadap nilai-nilai lokal atau nilai-nilai keagamaan. Integrasi antara reinterpretasi Al-Qur'an (narasi Ratu Bilqis) dan nilai-nilai kebudayaan Bugis Makassar (*Siri' na Pacce*) melahirkan model agensi politik yang khas dan berdaya tahan tinggi. Pembacaan terhadap dinamika politik di tingkat lokal membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai katalisator utama bagi demokratisasi dan keadilan gender yang inklusif (Clark, 2022).³⁹ Dengan demikian, persinggungan antara subversi dan adaptasi ini membentangkan

³⁸ Katharine McGregor, "Gendering Political Agency in Post-Authoritarian Local Elections," *South East Asia Research* 29, no. 4 (2021): 412–35.

³⁹ Janine A. Clark, "Local Politics, Gender Dynamics, and Religious Discourse in the Global South," *Comparative Politics* 54, no. 1 (2022): 89–112.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

wawasan baru mengenai bagaimana kepemimpinan perempuan dalam Islam diperjuangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan.

4. Titik Temu Etika Teologis dan Falsafah Lokal: Analisis Konseptual Nilai-Nilai Qur'anik dan Siri' na Paccé

Persinggungan antara nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan kearifan lokal masyarakat Bugis Makassar (*Siri' na Pacce*) membentuk fondasi sosio kultural yang sangat kokoh dalam merekonstruksi kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan. Teks keagamaan yang mengabadikan karakter kearifan Ratu Bilqis tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berdialog secara intensif dengan tatanan nilai lokal yang telah mengakar selama berabad-abad. Dalam konteks ini, dialektika antara agama dan budaya tidak memperlihatkan pertentangan ideologis, melainkan saling memperkuat legitimasi moral kepemimpinan publik (Mustafa, 2018).⁴⁰ Penyatuan dua entitas nilai ini menciptakan ruang sinergi yang efektif dalam mereduksi resistensi patriarkal yang sering kali muncul dalam momentum kontestasi politik lokal. Menurut pandangan para ahli sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar secara historis telah mengenal prinsip egaliter dalam kepemimpinan publik melalui konsep *Siri'* (harga diri dan martabat) serta *Pacce* atau *Passe* (empati dan kepedulian sosial). Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa ruang panggung kekuasaan pada era kerajaan tradisional seperti Gowa, Bone, dan Luwu tidak pernah diisolasi khusus untuk kaum laki-laki, sebagaimana terbukti dari hadirnya para raja perempuan (*Pajung* atau *Arung* perempuan) yang memimpin dengan penuh kewibawaan. Kehadiran nilai-nilai Ratu Bilqis

⁴⁰ Mustari Mustafa, "Dialektika Agama Dan Kebudayaan Lokal Dalam Masyarakat Bugis-Makassar," *Jurnal Filsafat Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2018): 45–63.

seperti kearifan diplomatik dan keutamaan musyawarah dinilai sangat relevan dan memperkaya konsepsi kepemimpinan ideal yang dipangku oleh etos *Siri' na Pacce* (Ansar, 2019).⁴¹ Dengan demikian, sejarah lokal memberikan ruang pemaknaan yang sangat adaptif terhadap hadirnya figur pemimpin perempuan di era kontemporer.

Sementara itu, perspektif feminis muslim mengulas persinggungan ini sebagai strategi adaptasi kultural yang sangat emansipatif bagi penegakan hak-hak politik perempuan. Para aktivis menilai bahwa pengintegrasian antara nilai keagamaan Quranik dan filosofi *Siri' na Pacce* mampu mentransformasikan wacana kesetaraan gender dari kesan sekuler menjadi ajaran yang bernapas keislaman dan kebudayaan lokal. Karakter Ratu Bilqis yang menjaga kehormatan kerajaannya melalui musyawarah dipadankan dengan prinsip menjaga *Siri'* (martabat negeri) dan memelihara *Pacce* (kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat) yang harus dimiliki seorang kepala daerah (Idrus, 2020).⁴² Akulturasi nilai ini menjadikan perjuangan kepemimpinan perempuan mendapatkan penerimaan sosial yang lebih luas tanpa melukai nilai-nilai keagamaan maupun adat istiadat.

Dalam arena kontestasi politik elektoral, persinggungan nilai agama dan budaya ini diartikulasikan oleh kandidat perempuan guna membentengi diri dari politisasi isu gender. Seorang pemimpin perempuan yang mampu menampilkan kearifan Ratu Bilqis sekaligus memegang teguh etos *Siri' na Pacce* dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sosok yang utuh dan

⁴¹ Ansar, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Sejarah Kerajaan Tradisional Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Sejarah Dan Budaya Lokal* 11, no. 2 (2019): 112–30.

⁴² Nurul Ilmi Idrus, "Gender, Culture, and Politics in South Sulawesi: Negotiating Local Values and Islamic Discourse," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 176, no. 3 (2020): 345–72.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

berintegritas tinggi. Penyatuan narasi transendental dan simbol kultural ini berfungsi efektif untuk meruntuhkan stereotip yang mempertentangkan antara ajaran Islam dan tradisi lokal dalam hal kepemimpinan (Kesuma, 2021).⁴³ Integrasi ini memberikan landasan etik yang sangat kuat bagi politisi perempuan untuk menjalankan peran publiknya secara maksimal.

Secara sosiologis, perjumpaan antara teks suci dan budaya lokal ini melahirkan apa yang disebut sebagai hibriditas legitimasi politik, di mana otoritas kepemimpinan tidak hanya bersumber dari prosedur demokrasi modern, melainkan juga dari restu teologis dan akseptabilitas budaya. Karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat menjunjung tinggi simbol-simbol keagamaan dan adat menjadikan model legitimasi ganda ini sebagai kunci keterpilihan dalam Pilkada. Formulasi retorika politik yang mensintesis narasi Quranik dan kearifan *Siri' na Pacce* terbukti mampu mengonsolidasikan basis dukungan dari kelompok masyarakat religius maupun pemangku adat lokal (Basir, 2017).⁴⁴ Sinergi ini memperjelas bahwa aspek kultural dan keagamaan dapat berjalan seiring dalam mendukung proses demokratisasi yang inklusif. Dengan demikian, persinggungan antara narasi Ratu Bilqis dan falsafah *Siri' na Pacce* menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan memiliki akar teologis dan historis yang sangat mengakar. Kehadiran pemimpin perempuan di panggung politik lokal tidak lagi dipandang sebagai sebuah anomali atau ancaman terhadap tatanan sosial, melainkan sebagai bentuk manifestasi dari keberlanjutan nilai-nilai luhur

⁴³ Andi Ima Kesuma, "Siri' Na Pacce Dan Etika Kepemimpinan Publik Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Kebudayaan Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2021): 88–104.

⁴⁴ M. Basir, "Integrasi Nilai Agama Dan Budaya Dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Bugis," *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 175–92.

agama dan budaya. Sintesis antara ajaran Islam yang emansipatif dan kearifan lokal yang teruji ini memberikan sumbangan konseptual yang sangat berharga bagi penguatan demokrasi berbasis kearifan lokal di Indonesia (Octaviani, 2022).⁴⁵ Dialektika ini menjadi pembuktian bahwa agama dan budaya lokal mampu berkolaborasi secara harmonis dalam mengawal kepemimpinan perempuan di era modern.

Integrasi antara etika teologis Islam dan falsafah lokal Bugis Makassar bukanlah bentuk penyerapan yang pasif, melainkan sebuah dialektika kebudayaan yang saling mengukuhkan agensi humanistik. Dalam konteks kepemimpinan, narasi Qur'anik tentang Ratu Bilqis (QS. An-Naml: 22-44) memperlihatkan rasionalitas, kedaulatan, dan keutamaan diplomasi sebagai pilar utama otoritas politik politik perempuan. Prinsip teologis ini menemukan artikulasi sosiokulturalnya di Sulawesi Selatan melalui falsafah *Siri' na Paccé*, sebuah tatanan etis yang menempatkan kehormatan, harkat kemanusiaan, dan empati kolektif di atas ambisi kekuasaan egosentris. Prinsip *Siri'* sebagai harga diri dan martabat teologis berdialog secara langsung dengan sikap Ratu Bilqis saat mempertahankan kedaulatan Negeri Saba' dari potensi dominasi militer asing.

Dalam narasi Qur'an, Bilqis menolak tunduk pada gertakan kekuatan material dan memilih jalur diplomasi yang bermartabat untuk melindungi rakyatnya dari kehancuran warisan perang. Aktualisasi integritas ini sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Bugis Makassar yang memandang bahwa pemimpin yang kehilangan *siri'* secara otomatis kehilangan hak moralnya

⁴⁵ A. Octaviani, "Kearifan Lokal Siri' Na Pacce Dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan Perempuan Di Era Modern," *Jurnal Humaniora Dan Kebudayaan* 14, no. 1 (2022): 50–68.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

untuk memerintah. *Siri'* bukan sekadar konsep harga diri individual yang kaku, melainkan sebuah nilai etis yang mewajibkan seorang pemimpin untuk menjaga kehormatan komunitasnya melalui kepemimpinan yang berakar pada kebajikan dan kejujuran etis (Kasim, 2021).⁴⁶ Sementara itu, dimensi *Paccé* atau empati sosial manifes dalam praksis kepemimpinan Bilqis ketika ia mendengarkan pertimbangan para pembesarnya namun tetap memprioritaskan keselamatan rakyat di atas ego elit politik. *Paccé* menuntut seorang pemimpin untuk merasakan penderitaan kolektif dan bertindak demi kesejahteraan umum (*masalah ammah*). *Paccé* mengekspresikan solidaritas komunal dan rasa kemanusiaan mendalam yang menjadi katup penyelamat dari kesewenang-wenangan otoritarian (Marzuki, 2023).⁴⁷ Ketika narasi Qur'an memperlihatkan Bilqis mengedepankan kearifan kompromi ketimbang konfrontasi berdarah, prinsip *Paccé* terefleksi secara utuh sebagai manifestasi etika kepedulian (*ethics of care*) yang secara historis diusung oleh para pemimpin perempuan di Sulawesi Selatan.

Hubungan dialektis ini semakin kokoh melalui integrasi sistem tata nilai *Pangadereng* (adat istiadat yang bermartabat) dengan ajaran Islam (*Siyasa Shar'iyah*). Dalam struktur kosmologi Bugis Makassar, kepemimpinan perempuan tidak dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai artikulasi dari prinsip kesederajatan peran politik selama syarat-syarat *ade'* (adat) dan *sara'* (syariat) terpenuhi. Perpaduan antara *Pangadereng* dan syariat Islam di Sulawesi Selatan menciptakan konstruksi politik yang inklusif, di mana nilai-

⁴⁶ A. Kasim et al., "Transformasi Etika *Siri'* Na *Paccé* Dalam Kepemimpinan Lokal Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Budaya* 12, no. 2 (2021): 115–30.

⁴⁷ M. Marzuki et al., "Dimensi *Paccé* Sebagai Empati Sosial Dalam Dialektika Tradisi Dan Keagamaan Masyarakat Makassar," *Jurnal Humaniora Dan Antropologi* 15, no. 3 (2023): 201–18.

nilai Islam menyempurnakan aspek spiritualitas lokal tanpa merusak tatanan kebudayaan egalitarian yang telah mengakui kepemimpinan perempuan (*Arung*) sejak era pra-Islam (Syandri, 2022).⁴⁸ Secara hermeneutis, dialog antara etika teologis Qur'an dan falsafah *Siri' na Paccé* mendekonstruksi bias patriarki yang sering kali mengalienasi perempuan dari panggung politik lokal. Model kepemimpinan Ratu Bilqis yang rasional, inklusif, dan deliberatif memberi bobot teologis bagi aktualisasi *Siri' na Paccé* dalam gaya kepemimpinan perempuan Bugis-Makassar. Reinterpretasi terhadap naskah dan falsafah lokal terbukti mampu melunakkan resistensi teologis maskulin, sekaligus mempertegas bahwa agensi politik perempuan adalah bagian integral dari sejarah pembentukan peradaban di Sulawesi Selatan yang bernafaskan keadilan sosial (Ismail, 2024).⁴⁹

Nilai musyawarah yang dipraktikkan oleh Ratu Bilqis ketika meminta pertimbangan para dewan kerajaan (*Qalat ya ayyuhal-mala'u aftuni fi amri*) juga merupakan cerminan murni dari tradisi *Tudang Sipulung* (duduk bermusyawarah) yang dipandu oleh etika *Siri' na Paccé*. Keputusan politik tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui konsensus bersama yang menghormati martabat setiap individu. Tradisi deliberatif di Sulawesi Selatan senantiasa mengedepankan prinsip keterbukaan dan kesetaraan hak bicara, yang mana nilai-nilai ini berkelindan erat dengan ajaran kesepakatan politik

⁴⁸ S. Syandri et al., "Integrasi Pangadereng Dan Siyasa Shar'iyah Dalam Historiografi Kerajaan Bugis-Makassar," *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (2022): 77–94.

⁴⁹ Ismail et al., "Reinterpretasi Kebudayaan Bugis Dan Konstruksi Agensi Perempuan Dalam Diskursus Keislaman Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Kebudayaan Dan Pikiran Islam* 24, no. 1 (2024): 45–62.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

(syura) dalam Al-Qur'an untuk mencegah lahirnya kepemimpinan tirani (Nur, 2022).⁵⁰

Dengan demikian, titik temu antara nilai-nilai Qur'anik dalam narasi Ratu Bilqis dan falsafah *Siri' na Paccé* membuktikan bahwa agensi politik perempuan memiliki akar teologis dan sosiokultural yang sangat kuat di Sulawesi Selatan. Perempuan tidak perlu mengadopsi kerangka pemikiran Barat untuk mengklaim hak-hak politiknya, sebab Islam dan kebudayaan lokal telah menyediakan basis epistemologis yang melimpah. Pertautan antara teks suci dan kebudayaan lokal di Sulawesi Selatan berhasil melahirkan paradigma kepemimpinan transformatif yang tidak hanya menjunjung tinggi kedaulatan etis, tetapi juga memperkuat hak-hak politik perempuan dalam ruang publik secara berkelanjutan.

Keberlanjutan sintesis antara nilai Qur'anik dan falsafah lokal ini juga mengejawantah dalam konsep *Siri'* sebagai instrumen kontrol diri (*self-restraint*) terhadap kepemimpinan yang manipulatif. Dalam kisah Ratu Bilqis, kecerdasan politiknya teruji ketika ia tidak membiarkan dirinya terkecoh oleh kilauan keagungan fisik istana Nabi Sulaiman, melainkan menggunakannya sebagai momentum pencarian kebenaran spiritual dan ketundukan teologis (*aslamtu ma'a Sulaymana lillahi Rabbil-'alamin*). Refleksi rasional dan spritual ini sejalan dengan watak dasar etika kepemimpinan Bugis Makassar yang menuntut adanya integritas batin (*tutu* dan *maccé*). Kepemimpinan lokal yang berlandaskan *Siri'* mewajibkan seorang pemimpin untuk menundukkan ego pribadi di bawah kebenaran moral dan kejujuran intelektual, sehingga

⁵⁰ M. Nur et al., "Musyawarah Dalam Perspektif Siri' Na Paccé: Relevansi Tradisi Tudang Sipulung Dengan Nilai Syura," *Jurnal Politik Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2022): 33–50.

kepemimpinan tidak berubah menjadi panggung pencitraan kekuasaan yang dangkal.

Selain itu, dinamika pendelegasian wewenang dan keterbukaan Ratu Bilqis terhadap masukan dewan kerajaan memperjelas bahwa agensi politik perempuan tidak pernah lepas dari kepemimpinan yang partisipatif. Dalam kosmologi politik Bugis Makassar, hal ini bertaut erat dengan prinsip *Lempu* (kejujuran) dan *Acca* (kecendekiaan) yang dipandu oleh etika *Siri' na Paccé*. Seorang pemimpin perempuan tidak hanya dituntut memiliki keberanian moral, tetapi juga kecerdasan navigasi dalam mengelola perbedaan pendapat. Artikulasi *Acca* dan *Lempu* dalam sejarah kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan terbukti mampu menciptakan stabilitas sosial karena keputusan-keputusan strategis senantiasa diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan kolektif ketimbang dorongan sektarian.

Perspektif kesetaraan yang koheren antara narasinya di dalam Al-Qur'an dan kebudayaan lokal turut membantah anggapan bahwa kepemimpinan perempuan secara kodrati bersifat emosional atau inferior. Ratu Bilqis ditampilkan sebagai sosok pemimpin strategis yang penuh perhitungan matang saat menghadapi ancaman krisis geopolitik, sebuah kualitas pragmatis-rasional yang sangat dihargai dalam falsafah *Siri' na Paccé*. Pandangan hidup masyarakat Sulawesi Selatan tidak pernah mendasarkan kapasitas politik seseorang pada jenis kelamin, melainkan pada kecakapan (*kewenangan etis*) dan komitmen kepemimpinan dalam menanggung beban *Siri'* (kehormatan) seluruh komunitas yang dipimpinnya.⁵¹

⁵¹ F. Faisal et al., "Dimension of Tauhid and Ethics of Care in Bugis Makassar Political Philosophy," *Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 18, no. 2 (2023): 177–94.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

Pada tataran diskursus spiritual, tunduknya Ratu Bilqis kepada Tuhan Semesta Alam (*Rabbil-'alamin*) mempertegas bahwa muara dari agensi politik perempuan adalah penegakan tauhid dan keadilan ekologis sosial. *Paccé* dalam konteks ini bertransformasi dari sekadar kepedulian sosiologis menjadi kesadaran transendental bahwa setiap bentuk kekuasaan politik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Ilahi. Integrasi antara kesadaran tauhidik dan etika *Paccé* melahirkan kepemimpinan yang profetik—di mana kekuasaan dipandang sebagai amanah penderitaan rakyat, bukan takhta untuk memupuk kekayaan atau mendominasi struktur sosial.⁵²

Pada akhirnya, rekonstruksi dialogis antara narasi Qur'anik Ratu Bilqis dan konsep *Siri' na Paccé* memberikan kontribusi epistemologis penting dalam memetakan ulang kepemimpinan perempuan di Nusantara. Sinergi ini membuktikan bahwa nilai-nilai keagamaan universal dan kearifan lokal Sulawesi Selatan tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkaya untuk membongkar narasi-narasi patriarkal yang hegemonik. pertautan antara etika teologis Al-Qur'an dan falsafah *Siri' na Paccé* menyediakan dasar pijakan yang sangat kokoh bagi penguatan hak-hak politik perempuan, sekaligus menegaskan kembali keberadaan Sulawesi Selatan sebagai wilayah dengan historiografi kepemimpinan perempuan yang kaya dan bermartabat.⁵³

⁵² Faisal et al., "Dimension of Tauhid and Ethics of Care in Bugis Makassar Political Philosophy."

⁵³ W. Wahyudi et al., "Reorganisasi Diskursus Kepemimpinan Perempuan: Perpaduan Teks Qur'anik Dan Local Wisdom Sulawesi Selatan," *Jurnal Politica Islamica* 13, no. 1 (2024): 55–72.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis mendalam yang telah dipaparkan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa narasi Quranik Ratu Bilqis (QS. An-Naml: 20-44) bukanlah sekadar kisah sejarah transendental yang pasif, melainkan sebuah instrumen teologis politik aktif yang secara signifikan merekonstruksi agensi politik perempuan di Sulawesi Selatan. Temuan penelitian ini berhasil mematahkan dogma dan mitos teologis konservatif yang selama ini membatasi peran publik perempuan. Melalui empat indikator utama agensi politik Bilqis, yaitu kearifan diplomatik, pelebagaan musyawarah (*syūrah*), kemandirian keputusan, dan pragmatisme strategis, dengan itu teks Al-Qur'an secara eksplisit menyediakan fondasi emansipatif yang kokoh bagi kepemimpinan perempuan dalam otoritas publik.

Artikulasi narasi Ratu Bilqis dalam arena kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Selatan bekerja secara efektif sebagai modal simbolik (*symbolic capital*) untuk menangkis retorika misoginis berbasis teks-teks keagamaan parsial. Keberhasilan negosiasi wacana ini semakin diperkuat oleh adanya konvergensi yang harmonis antara nilai-nilai Quranik dan kearifan lokal Bugis Makassar, khususnya etos *Siri' na Pacce* yang secara historis memiliki akar tradisi kepemimpinan perempuan (*Pajung/Arung* perempuan). Perjumpaan antara hermeneutika Al-Qur'an yang pembebas dan budaya lokal melahirkan sinergi legitimasi politik yang menempatkan agensi politik perempuan berada pada posisi lentur antara subversi terhadap tatanan patriarkal dan adaptasi terhadap pranata keagamaan masyarakat

Guna merawat iklim demokrasi yang inklusif serta memperluas ruang partisipasi politik perempuan yang berbasis pada keadilan teologis dan kultural, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis. *Pertama*,

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

penguatan literasi keagamaan inklusif gender di masyarakat sipil. Organisasi keagamaan berbasis massa (seperti NU, Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Muslimat), bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), perlu secara masif menggalakkan pengajian, diklat, dan kurikulum pendidikan keagamaan yang berwawasan keadilan gender. Internalisasi tafsir Al-Qur'an yang emansipatif, seperti narasi Ratu Bilqis sangat krusial untuk meliterasi masyarakat akar rumput agar tidak mudah terpengaruh oleh politisasi agama yang diskriminatif selama momentum pemilu. *Kedua*, reformasi kaderisasi dan rekrutmen di internal partai politik. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah direkomendasikan untuk melembagakan standar rekrutmen politik yang responsif gender, bukan sekadar untuk memenuhi kuota formalitas. Partai politik perlu menyusun modul pelatihan kepemimpinan politik perempuan yang mengintegrasikan aspek kapasitas teknis pemerintahan, komunikasi politik, dan pemahaman hermeneutika keagamaan yang inklusif agar calon yang diusung memiliki legitimasi teologis sosial yang tangguh. *Ketiga*, edukasi politik berbasis kearifan lokal bagi penyelenggara dan pengawas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat daerah perlu memperketat pengawasan terhadap praktik politik identitas yang menggunakan narasi-narasi keagamaan atau adat untuk menjatuhkan kandidat berdasarkan gender. Sosialisasi regulasi pemilu hendaknya dibingkai dengan pendekatan kearifan lokal (*Siri' na Pacce*) untuk mendorong kontestasi politik yang beradab dan terhindar dari *hate speech* berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. "The Active Role of Da'wah in Empowering Individuals for Social Change." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 7, no. 1 (2017): 48–62.
- Ansar. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Sejarah Kerajaan Tradisional Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Sejarah Dan Budaya Lokal* 11, no. 2 (2019): 112–30.
- Ardiansa, Dirga. "Electoral Systems and Female Political Representation in Indonesian Local Legislatures." *Contemporary Southeast Asia* 44, no. 1 (2022): 102–26.
- Arfin, Muhammad. "Strategi Komunikasi Politik Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Menghadapi Isu Gender." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, no. 2 (2019): 130–48.
- Baidhaw, Zakiyuddin. "Theology of Liberation in Indonesian Islam: Gender Equality and Social Justice Perspectives." *Critical Research on Religion* 10, no. 1 (2022): 55–72.
- Bakti, Andi Faisal. "Communication and Family Planning in Islam: The Case of South Sulawesi." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 321–50.
- Barlas, Asma. "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an." *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 22–41.
- Basir, M. "Integrasi Nilai Agama Dan Budaya Dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Bugis." *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 175–92.
- Clark, Janine A. "Local Politics, Gender Dynamics, and Religious Discourse in the Global South." *Comparative Politics* 54, no. 1 (2022): 89–112.
- Derichs, Claudia. "Knowledge Production, Gender, and Local Politics in Muslim-Majority Societies." *Journal of Religious and Political Studies* 5, no. 2 (2017): 112–34.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Gender Equality and Islamic Family Law Reform in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 1–24.
- Faisal, F., M. Munir, and N. Hasanah. "Dimension of Tauhid and Ethics of Care in Bugis Makassar Political Philosophy." *Jurnal Keislaman Dan Peradaban* 18, no. 2 (2023): 177–94.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

Haris, Andi. "Politik Identitas Dan Modal Keagamaan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Komunikasi Politik* 8, no. 1 (2018): 45–62.

Hasan, A. "The Role of Participatory Approach in Effective Da'wah." *Journal of Islamic Studies and Research* 16, no. 2 (2017): 61–76.

Hashemi, Nader. "Rethinking Religion, Secularism, and the Crisis of Political Islam." *International Journal of Islamic Politics* 12, no. 1 (2018): 45–68.

Hasnah, Sitti. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Politik Lokal Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Al-Maiyyah* 13, no. 2 (2020): 140–62.

Hidayat, Rian. "Agensi Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada: Studi Atas Wacana Keagamaan Inklusif." *Jurnal Politika* 12, no. 2 (2021): 180–98.

Idrus, Nurul Ilmi. "Gender, Culture, and Politics in South Sulawesi: Negotiating Local Values and Islamic Discourse." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 176, no. 3 (2020): 345–72.

Ilyas, Hamim. "Rekonstruksi Tafsir Gender Al-Qur'an: Menuju Keadilan Hakiki Dalam Relasi Sosial." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 113–36.

Ismah, Nor. "Women Ulema and Fatwa Making in Indonesia: Reclaiming Religious Authority." *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019): 483–517.

Ismail, Supratman, and A. Ahmad. "Reinterpretasi Kebudayaan Bugis Dan Konstruksi Agensi Perempuan Dalam Diskursus Keislaman Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Kebudayaan Dan Pikiran Islam* 24, no. 1 (2024): 45–62.

Jurdi, Syarifuddin. "Politik Elektoral Dan Sosiologi Pemilu Di Sulawesi Selatan: Analisis Perilaku Politik Masyarakat Muslim." *Jurnal Politika* 13, no. 1 (2022): 55–74.

Karunia, Luki. "Modal Simbolik Dan Mobilisasi Dukungan Pemilu Dalam Kontestasi Politik Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 2 (2020): 215–38.

- Kasim, A., A. Pattimukrawali, and F. Rahman. "Transformasi Etika Siri' Na Paccé Dalam Kepemimpinan Lokal Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Budaya* 12, no. 2 (2021): 115–30.
- Kesuma, Andi Ima. "Siri' Na Pacce Dan Etika Kepemimpinan Publik Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Kebudayaan Dan Masyarakat* 13, no. 1 (2021): 88–104.
- Machasin. "Kekuasaan Dan Etika Musyawarah: Membaca Kembali Narasi Ratu Saba' Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hermeneutika Teologi* 10, no. 1 (2019): 45–62.
- Marcoes, Lies. "Gerakan Perempuan Muslim Dan Dekonstruksi Wacana Patriarki Di Indonesia." *Jurnal Perempuan* 24, no. 3 (2019): 189–206.
- Marzuki, M., A. Kahar, and M. Akib. "Dimensi Paccé Sebagai Empati Sosial Dalam Dialektika Tradisi Dan Keagamaan Masyarakat Makassar." *Jurnal Humaniora Dan Antropologi* 15, no. 3 (2023): 201–18.
- McGregor, Katharine. "Gendering Political Agency in Post-Authoritarian Local Elections." *South East Asia Research* 29, no. 4 (2021): 412–35.
- Mulia, Siti Musdah. "Deconstruction of Patriarchal Interpretation on Women's Political Leadership in Islam." *Journal of Islamic State and Society* 2, no. 2 (2020): 101–24.
- Murdiyanto. "Politik Identitas Dan Strategi Komunikasi Calon Kepala Daerah Perempuan Pada Pilkada Serentak." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 1 (2020): 34–49.
- Mustafa, Mustari. "Dialektika Agama Dan Kebudayaan Lokal Dalam Masyarakat Bugis-Makassar." *Jurnal Filsafat Dan Kebudayaan Islam* 12, no. 1 (2018): 45–63.
- Nasution, Khoiruddin. "Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Demokrasi Modern." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 45–68.
- Nur, M., A. Halim, and F. Firman. "Musyawarah Dalam Perspektif Siri' Na Paccé: Relevansi Tradisi Tudang Sipulung Dengan Nilai Syura." *Jurnal Politik Dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2022): 33–50.
- Octaviani, A. "Kearifan Lokal Siri' Na Pacce Dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan Perempuan Di Era Modern." *Jurnal Humaniora Dan Kebudayaan* 14, no. 1 (2022): 50–68.

Rosmini, A. Jufri

Konstruksi Teologis Agensi Politik Perempuan: Relevansi Narasi Qur'anik Ratu Bilqis dengan Peran Politik Perempuan Bugis-Makassar

- Parewangi, Andi Muhammad Iqbal. "Peran Sejarah Perempuan Bugis Dalam Panggung Politik Kerajaan Tradisional Sulawesi Selatan." *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 5, no. 2 (2017): 89–104.
- Qibtiyah, Alimatul. "Feminism and Islamic Reform in Indonesia: Progressive Interpretations and Social Movements." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 241–68.
- Qodir, Zuly. "Islamisme Dan Politics of Identity Dalam Pilkada Serentak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 3 (2020): 310–32.
- Rijal, Syamsul. "Re-Positioning Tradition and Modernity: Local Politics and Islamic Discourse in South Sulawesi." *Journal of Southeast Asian Studies* 51, no. 3 (2020): 412–33.
- Rofiah, Nur. "Keadilan Hakiki Bagi Perempuan Dalam Islam: Konsep Dan Implikasi Metodologis." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 17, no. 1 (2022): 1–20.
- Sabri, Muhammad. "Spiritualitas Dan Kearifan Lokal Bugis Makassar Dalam Dialektika Keislaman." *Jurnal Ulumuna* 22, no. 1 (2018): 145–68.
- Schäfer, Saskia. "Local Traditions and Religious Authority in Contemporary Indonesian Governance." *Asian Journal of Social Science* 47, no. 3 (2019): 301–25.
- Shihab, M. Quraish. "Membaca Teks Keagamaan Dalam Perspektif Kemanusiaan Dan Kesenjangan." *Jurnal Hermeneutika Teologi* 9, no. 1 (2018): 15–32.
- Srimulyani, Eka. "Women, Islamic Leadership, and Local Politics in Post-Reform Indonesia." *Asian Survey* 61, no. 4 (2021): 615–39.
- Syandri, S., A. Kadir, and M. Firdaus. "Integrasi Pangadereng Dan Siyasa Shar'iyah Dalam Historiografi Kerajaan Bugis-Makassar." *Jurnal Hukum Dan Kebudayaan Islam* 14, no. 1 (2022): 77–94.
- Turgut, Nevin. "Reclaiming Sacred Texts: Feminist Hermeneutics and Women's Political Participation in Islamic Contexts." *Gender & Development* 28, no. 2 (2020): 215–36.
- Umam, Khaerul. "Siri' Na Pacce Dan Etika Politisi Bugis: Integrasi Nilai Lokal Dalam Sistem Demokrasi Modern." *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): 67–85.

- Umar, Hasbi. "Peran Ulama Lokal Dalam Pembentukan Wacana Keagamaan Inklusif Pada Pilkada." *Jurnal Riset Keagamaan Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 88–105.
- Umar, Nasaruddin. "Tafsir Gender: Reinterpretasi Teks Keagamaan Dalam Perspektif Emansipatif." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 13, no. 2 (2018): 112–28.
- Wadud, Amina. "Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective in Modern Context." *Journal of Feminist Studies in Religion* 34, no. 2 (2018): 89–110.
- Wahyudi, W., M. Mansyur, and S. Suhari. "Reorganisasi Diskursus Kepemimpinan Perempuan: Perpaduan Teks Qur'anik Dan Local Wisdom Sulawesi Selatan." *Jurnal Politica Islamica* 13, no. 1 (2024): 55–72.